

Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta Dalam Menanggulangi Penyebaran Spoiler Film Di Media Sosial Tiktok: Studi Kasus Film Mencuri Raden Saleh

Syahrul Yaumil

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Syahrul.yaumil19@mhs.uinjkt.ac.id

Nahrowi

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

nahrowi@uinjkt.ac.id

Abstract. The effectiveness of the Copyright Law in dealing with the practice of spreading movie spoilers on TikTok social media, with a case study of the film *Mencuri Raden Saleh*. The phenomenon of movie spoilers on social media is a problem that impacts the economic and moral rights of creators of cinematographic works. This study uses a sociological, legal approach to understand the interaction of society with applicable legal norms. The study results indicate that TikTok's policies are not yet in line with copyright protection regulations in Indonesia, so copyright infringement in the form of spoilers and film piracy is still difficult to control. Although Law Number 28 of 2014 has provided legal protection for copyright holders, its implementation is still hampered by the nature of the complaint offense, which requires copyright owners to file a report first so that the legal process can run. In addition, the low public legal awareness of copyright is also a significant factor in the

rampant practice of movie piracy on social media. Therefore, a more comprehensive regulatory update is needed, as increased supervision of digital platforms and wider socialization to raise public awareness of the importance of copyright protection in the digital era.

Keywords:

Movie Spoilers; TikTok; Cinematographic Works; Copyright.

Abstrak. Efektivitas Undang-Undang Hak Cipta dalam menangani praktik penyebaran spoiler film di media sosial TikTok, dengan studi kasus film *Mencuri Raden Saleh*. Fenomena spoiler film di media sosial menjadi permasalahan yang berdampak pada hak ekonomi dan moral pencipta karya sinematografi. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami interaksi masyarakat dengan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan TikTok belum selaras dengan regulasi perlindungan hak cipta di Indonesia, sehingga pelanggaran hak cipta dalam bentuk spoiler dan pembajakan film masih sulit dikendalikan. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta, penerapannya masih terkendala oleh sifat delik aduan, yang mengharuskan pemilik hak cipta untuk mengajukan laporan terlebih dahulu agar proses hukum dapat berjalan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta juga menjadi faktor utama dalam maraknya praktik pembajakan film di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan pengawasan terhadap platform digital, serta sosialisasi yang lebih luas guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dalam era digital.

Kata kunci:

Spoiler Film; TikTok; Karya Sinematografi; Hak Cipta.

Pendahuluan

Penggunaan media sosial tentu saja tidak lepas dari dampak positif dan negatif yang didapatkan, baik dampak langsung kepada penggunaannya atau pihak lain terkait dengan konten media sosial tersebut. Internet pun dapat berperan menjadi pedang bermata dua.¹ Hal ini dikarenakan selain memberikan kontribusi bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan peradaban manusia, internet juga akan menjadi sarana efektif terciptanya suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi fenomena yang menjadi suatu permasalahan sampai saat ini dan belum terselesaikan ialah tidak lepasnya pelanggaran hak cipta karya sinematografi di media sosial.

Bentuk-bentuk penyalahgunaan baik itu disengaja maupun kelalaian dalam pemanfaatan teknologi tersebut misalnya dalam unggahan atau mengunggah cuplikan film sebagian atau keseluruhannya ke media sosial ketika menonton di bioskop. Tindakan ini atau yang sering disebut dengan istilah Spoiler film. Spoiler film adalah istilah yang umum digunakan situs media sosial. Spoiler dalam bahasa merupakan istilah mencerminkan atau memantulkan secara konotasi apa yang dimaknai secara harfiah atas tindakan, yaitu "mencerminkan/memantulkan" atau muat ulang untuk apapun yang menjadi obyek, baik tulisan, musik maupun film di dunia maya. Sebelum film ditonton, melihat atau review film yang beredar tersebut menjadi salah satu kebiasaan masyarakat sebelum menonton. Dimana dengan review film dapat membuat orang-orang lebih tertarik untuk menonton film tersebut. Kebanyakan review film tersebut mencakup hal-hal adegan penting terkait yang ada pada film atau yang dapat kita sebut spoiler. Spoiler cenderung menjelaskan secara rinci alur cerita yang diberikan oleh peneliti. Tindakan tersebut apabila dikaji jelas bertentangan dengan beberapa aturan-aturan

¹ Djaja Ermansyah, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Pustaka Timur, 2010).

khusus terkait hak ekonomi dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap tindakan spoiler tersebut.

Berbagai bentuk spoiler ada di media sosial, seperti mengemas spoiler film menggunakan *running text*, membuat spoiler film yang dibagi menjadi beberapa bagian hingga akhir, dan mengemas spoiler film berdasarkan setiap bagian cerita melalui video pendek. Media sosial yang kerap menayangkan spoiler film, seperti di aplikasi TikTok, Facebook, dan Instagram melalui IGTV. Adanya spoiler dapat menghilangkan minat seseorang dalam menikmati konten dan dapat mengurangi nilai kesenangan dalam membaca atau menonton sebuah cerita dalam sebuah film. Misalnya film yang sedang populer saat ini yaitu film Mencuri Raden Saleh, film ini akan tayang di bioskop pada tanggal 25 Agustus 2022 dan mendapat rating 8.2. Namun, masih banyak penikmat film yang belum mematuhi undang-undang untuk tidak memperbanyak film baik dengan cara merekamnya di bioskop maupun mengunduhnya dari situs ilegal kemudian mendistribusikannya ke media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lainnya. Hal ini sangat disayangkan, padahal pihak pembuat film telah menghimbau dan memperingati melalui akun media sosial film tersebut atau akun masing-masing sehingga para penikmat film hanya dapat menikmati karya film tersebut dengan menonton langsung di bioskop. Karena jika melakukan spoiler cuplikan film di media sosial akan dihukum sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Film Mencuri Raden Saleh diduga telah dibajak dengan cara merekam secara utuh langsung dari layar bioskop. Setidaknya ada 7 situs yang telah menayangkan film tersebut yang dibajak dan disebar lagi ke situs-situs lain di internet. Kuasa hukum Visinema Pictures telah melaporkan dugaan pembajakan film tersebut ke Polda Metro Jaya tertanggal 21 September 2022. Karena maraknya pembajakan film, banyak bocoran rekaman atau spoiler film yang diposting di media sosial. Ini sangat merugikan dan berimplikasi serius pada hak

cipta pembuat film. Sejauh ini, hanya insiden terkait film ini yang dilaporkan atau proses hukum yang disiapkan terhadap pelakunya, dan lainnya hanya sebatas somasi (peringatan) kepada penonton bioskop.

Diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.² Jenis-jenis sinematografi yang telah dipublikasikan dari ciptaan memiliki objek yang berkaitan dengan Hak Cipta, dimana merupakan ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang telah memberikan kontribusi atas dibuatnya ciptaan tersebut. Maka film atau sinematografi masuk dalam ranah kekayaan intelektual khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Suatu hasil karya ciptaan yang telah dipublikasikan mereka berhak untuk mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui Lembaga Penyiaran. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, seperti penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan di media sosial, salah satu contohnya yaitu pengunggah spoiler film tanpa adanya izin dari pencipta atau secara ilegal.

Dampak tindakan spoiler tersebut adalah masyarakat dapat melihat unggahan cuplikan adegan film dan mengetahui alur cerita suatu film tanpa menonton film tersebut di bioskop. Sehingga masyarakat dapat menilai apakah film tersebut layak untuk ditonton atau tidak layak untuk ditonton. Dampak dari hal tersebut adalah berkurangnya peminat atau daya tarik masyarakat untuk menonton suatu film. Hal tersebut jelas merugikan pemilik atau pemegang hak cipta suatu film atas ciptaannya.

²Rahmi Jened, *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan(Penyalahgunaan HKI)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 91.

Tindakan spoiler cuplikan film dinilai melanggar hukum karena masuk dalam tindakan ilegal. Penyebaran video yang dilakukan juga tanpa izin terhadap pencipta cerita, sehingga pembajakan hanya menguntungkan satu pihak.³ Selain itu, dalam hal seseorang memiliki dan menyebarkan suatu cuplikan film yang dilekati hak cipta, terlebih terhadap film yang seharusnya hanya dapat dinikmati bagi pelanggan berbayar di suatu platform streaming digital, patut diduga yang bersangkutan telah melakukan pembajakan, yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi maka akan dijerat dengan Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan dan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu untuk menunggunya⁴. Media sosial menjadi salah satu ladang pembajakan paling di gemari. Maraknya penggunaan media sosial tanpa ada batas-batas yang jelas atas konten spoiler film atau lainnya yang harusnya di buat menjadikan media sosial sebagai lahan yang paling berpotensi.

Tindakan pelaku spoiler film pada media sosial dapat menimbulkan dampak kerugian terhadap pemegang hak cipta film tersebut karena banyak aplikasi di media sosial yang sering memunculkan unggahan spoiler film tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta atau ilegal, dan memungkinkan dapat

³Redaksi Justika, *Fakta Aturan Hukum Spoiler Film, Boleh Atau Dilarang?*, <https://blog.justika.com/kekayaan-intelektual/aturan-hukum-spoiler-film/> Diakses pada 14 September 2022.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cpta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung, Mandar Maju, 2000, h. 56.

menimbulkan kerugian khususnya dalam hak ekonomi dan komersil. Karena dengan tindakan spoiler cuplikan film itu, pelaku spoiler cuplikan film dapat menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan membuat konten mengenai spoiler film-film yang ada di bioskop tanpa izin kepada pemegang hak cipta. Masih banyak spoiler cuplikan film yang beredar dimasyarakat, namun belum ada satu pun putusan hakim yang membahas hal tersebut atau dalam artian belum ada produser film yang mengajukan gugatan terkait hal tersebut, karena produser film hanya sampai surat somasi(surat peringatan)saja kepada penikmat film dan belum adanya gugatan terhadap pelaku spoiler cuplikan film di media sosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian empiris, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Terhadap Spoiler Film di Media Sosial

Pemanfaatan media online sesungguhnya ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan pembukaan UUD 1945, lebih dari itu, pemanfaatan media online sendiri harus dilandasi oleh kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian dan itikad baik. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut, penyebaran/pembeberan film di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang seharusnya hanya dimiliki secara eksklusif oleh pencipta, dan dapat untuk disebarkan apabila mendapatkan persetujuan dari pencipta itu sendiri. Romli J.P. Nasution berpendapat bahwa dalam sistem hukum civil law "pencipta memiliki hak untuk melarang

perusakan atau perubahan atas ciptaannya yang mungkin akan merusak legitimasi dari ciptaan itu sendiri".⁵ Karya cipta dalam bentuk digital memang sangat mudah untuk diduplikasi dan hasil atas perbuatan tersebut juga nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Orang pun kemudian dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan mendistribusikannya ke seluruh dunia dengan nyaris tanpa biaya. Di satu sisi, hal ini tentu sangat mudah membuat semua orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar.

Perbuatan seseorang yang menyebarkan cuplikan karya sinematografi atau spoiler film ke media sosial dapat termasuk sebagai pengumuman ciptaan, yang mana perbuatan tersebut merupakan hak ekonomi dari pencipta/pemegang hak cipta. Sehingga, perbuatan tersebut pada dasarnya wajib mendapatkan izin pencipta/pemegang hak cipta. Dalam hal seseorang memiliki dan menyebarkan suatu cuplikan film yang dilekati hak cipta, terlebih terhadap film yang seharusnya hanya dapat dinikmati bagi pelanggan berbayar di suatu platform streaming digital, patut diduga yang bersangkutan telah melakukan pembajakan, yaitu penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk

⁵ Romly J.P. Nasution, 2013, "Interface Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan", Rajawali Press, Kencana, h; 128

⁶ Permatasari Erizka, *Sebar Spoiler Cuplikan Film Di TikTok, Langgar Hak Cipta?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-tiktok-langgar-hak-cipta-lt614dc86b31980> diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam Masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Sedangkan sebagaimana Pasal 8, hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Penerapan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui website tanpa bayar di internet dan spoiler film yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui undang-undang hak ciptanya. Pasal 7 TRIPS (Tread Related Aspect of Intellectual Property Right) menjabarkan tujuan dari perlindungan dan penegakan hak atas kekayaan intelektual adalah perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di bidang ciptaan diperlukan campur tangan negara dengan tujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Seperti diketahui bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengontrol masyarakat dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, di lain pihak warga masyarakat

dapat menggunakan ciptaan secara resmi dan menghindari peredaran film bajakan, sedangkan negara kepentingannya dapat menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat di bidang ciptaan. Masalah pokok dalam penerapan hak cipta di Indonesia adalah pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia. Perundang-undangan Hak Cipta juga belum komprehensif, di mana peraturan tentang hak cipta kini telah berubah yang awalnya merupakan delik umum kini telah menjadi delik aduan. Hal itu berarti, meskipun pihak pemerintah telah mengetahui problematik tentang pelaksanaan hukum terkait pelanggaran terhadap hak cipta karya sinematografi yang terjadi di masyarakat, pihak pemerintahan tidak dapat melakukan apapun dikarenakan tidak adanya pengaduan dari pihak pemegang hak cipta dan hak terkait.

Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik intelektual pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait, banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya. Seperti yang diketahui bahwa terkhususnya di Indonesia para pemegang hak cipta dan hak terkait tidak terlalu aktif dalam melaporkan setiap pelanggaran yang ada terutama pada media sosial seperti TikTok.⁷ Karena pengetahuan tentang hak cipta ini masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi. Akibatnya, masyarakat banyak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak

⁷ Nandiansyah et al, “Kesadaran Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet”, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2022, h. 77-87

cipta dan hak terkait membuat mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

Aparat penegak hukum pun banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya.^b Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebaran konten, serta kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan. Peraturan Menteri Bersama Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik merupakan pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan dalam peraturan menteri bersama mengatur tentang tata cara penyampaian laporan pelanggaran hak cipta, pelaporan dapat dilakukan secara elektronik maupun non elektronik dengan memenuhi syarat yang sudah ditetapkan. Selanjutnya laporan akan dilakukan verifikasi terhadap laporan yang telah di register, yang dilakukan oleh tim verifikasi. Setelah dirasa cukup bukti bahwa situs yang

⁸ Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting Society*, (Bandung: Alumni, 2008), h. 251-252.

dilaporkan memenuhi unsur pelanggaran hak cipta maka selanjutnya situs tersebut diblokir paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima. Pemilik situs dapat mengajukan permohonan pembukaan blokir bilamana ia merasa tidak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait.

Perlindungan hukum sendiri memiliki makna memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 9

Pertama, perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungannya terhadap pencipta dapat dilihat pada Pasal 54-56. Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi maka pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan serta penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak dan pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan seperti di bioskop. Untuk memberikan perlindungan, pemerintah membuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Kedua, perlindungan represif berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi atau telah dilakukan pelanggaran. Bentuk perlindungannya terhadap pencipta dapat dilihat pada Pasal 56 sampai 58. Pemerintah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah website yang dianggap melakukan pelanggaran hak

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 74.

cipta tersebut. Pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Perihal penerapan hukum dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi dari pencipta ini sama dengan maksud dari teori karya menurut John Locke. Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya (labour) karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan "kepribadian" ke dalam sesuatu. Teori ini titik tekannya pada aspek proses menghasilkan sesuatu dan sesuatu yang dihasilkan. Artinya menghasilkan suatu karya tidak serba otomatis, melainkan melalui tahap-tahap yang harus dilewati. Maka proses berkarya yang menghasilkan suatu ciptaan atau temuan (invensi) sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) terhadap ciptaan tersebut, sehingga orang lain tidak boleh mengakui ciptaan dan pencipta atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum atas ciptaannya tersebut. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat akan mempengaruhi penghargaan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat hambatan terhadap penerapan hukum serta membuat para pencipta malas untuk berkarya dan kondisi ini pula dibuat semakin parah karena adanya pemikiran bahwa profesi pencipta belum cukup menjadi jaminan seseorang akan mendapatkan hidup yang layak. Dengan adanya aplikasi video

musik yaitu TikTok dapat digunakan untuk menyebarluaskan klip film maupun spoiler film Indonesia yang sedang tayang di Indonesia. Pemegang hak cipta film pun memiliki hak untuk dapat melindungi kepentingan pribadi atas ciptaannya dalam hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atas reputasinya.

10

Para pencipta berhak untuk menuntut ganti rugi jika terjadinya pembajakan atau spoiler film yang merugikannya dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga atau melaporkannya terlebih dahulu ke DJKI. Pengaturan mengenai ganti rugi akibat pelanggaran hak ekonomi tersebut diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah: (1). Pencipta/Pemegang hak cipta dan/atau hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi dapat mengajukan untuk mendapatkan ganti rugi. (2). Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta dan/atau hak terkait.

(3). Pembayaran ganti rugi yang dilakukan kepada pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan ditetapkan.

Menurut (DJKI) kerugian yang ditimbulkan dari pembajakan atau spoiler film itu biasanya adalah kerugian ekonomi. Biasanya pemegang hak cipta akan menuntut ganti rugi kepada pelaku atas pelanggaran hak cipta karya filmnya tersebut. Karena adanya kerugian yang nominalnya bisa dibuktikan secara fakta dan bukan mengira-ngira. Sehingga pemegang hak cipta bisa melakukan upaya hukum untuk melindungi ciptaannya. Misalnya target penonton film yang diharapkan ditonton hingga 1 juta lebih namun, dengan adanya spoiler atau pembajakan film di TikTok hanya ditonton

¹⁰ Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2012), h. 64

sekitar 500 ribu penonton saja. Hal tersebut sangat merugikan pemegang hak cipta atau produser film yang telah mengeluarkan modal yang banyak tetapi yang menonton tidak sesuai target yang di harapkan.¹¹

Melalui exposure yang dimiliki TikTok tentu tindakan penayangan spoiler film tersebut dapat memberikan kerugian ekonomi dan kerugian lain kepada berbagai pihak seperti, masyarakat yang belum menonton film, pencipta atau pemegang hak cipta, dan platform penyedia layanan film. Dengan adanya spoiler dan pembajakan film di aplikasi TikTok sudah jelas melanggar hak cipta yang terkandung di dalamnya hak deklaratif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya oknum-oknum yang memposting potongan film ke aplikasi tersebut artinya sudah melanggar hak ekonomi dari sang pencipta film tersebut karena mereka secara tidak langsung sudah melakukan penggandaan yang dimana hal itu hanya dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta atau sang pencipta film tersebut. Dimana yang kita ketahui bahwa di aplikasi TikTok sekarang sudah dapat mendapatkan keuntungan atau uang jika kita membuat konten yang ditonton oleh banyak orang.

Ada 3 (tiga) hal yang mempengaruhi keuntungan / benefit secara ekonomis dalam menggunakan aplikasi TikTok, yaitu pengikut (followers), penyuka (likes), dan tingkat keterlibatan (engagement). Sehingga dapat disimpulkan bahwa para pelaku pembajakan film di TikTok tersebut memanfaatkan potongan-potongan film tersebut yang ia unggah ke akunnya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan bagi dirinya secara ekonomis. Maka sudah sepatutnya TikTok menindaklanjuti hal tersebut dengan alasan apapun itu, sebab segala sesuatu yang terjadi dalam sistem elektronik, merupakan pertanggungjawaban TikTok sesuai Pasal 3 ayat (2) PP PSTE.

¹¹ Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, Sub. Koordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Pada tanggal 12 April 2023.

Adapun contoh postingan film mencuri raden saleh yang banyak beredar di aplikasi TikTok, yang dimana film tersebut videonya dipotong berdasarkan beberapa part (klip film) yang dimana hal tersebut menarik minat pengguna TikTok sehingga akunnya dapat mengalami kenaikan followers, banyak jumlah likes, comment dan jumlah views. Hal tersebut menguntungkan pemilik akun secara komersil.

Terdapat beberapa jenis hak ekonomi yang dilanggar dalam penggunaan aplikasi TikTok, yaitu¹²: (1). Hak memperbanyak ciptaan (penggandaan), yaitu menggandakan jumlah ciptaan untuk menghasilkan ciptaan yang menyerupai ciptaan asli. Contohnya ialah oknum yang membajak film – film di Tiktok melakukan penggandaan dan di unggah ke TikTok. (2). Hak pengumuman (penyiaran), artinya video yang sudah diunggah ke TikTok dapat disebar kembali ke media sosial lainnya. Artinya, potongan – potongan film yang sudah di unggah oleh oknum tersebut dapat disebar lebih luas lagi oleh masyarakat sehingga kerugian yang didapatkan oleh sang pencipta akan berkali lipat lebih banyak dan meningkat.

Berdasarkan hal di atas akun tersebut telah melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Tiktok termasuk ke dalam penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Dalam Pasal 9 Ayat 3 menerangkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang. Lalu wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang dengan mengtake down video tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Perkominfo No. 5 tahun 2020.

¹² Wanda Ainun Nisa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia Di Aplikasi TikTok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta” Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Menurut pandangan DJKI, sulit mencegah orang untuk melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi jika atas apa yang ia lakukan menimbulkan pelanggaran dan adanya aduan maka mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum atas tindakan yang ia lakukan. Upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap pelaku pembajakan atau spoiler film di TikTok yaitu bisa melaporkan terkait dugaan pelanggaran hak cipta karena telah menyebarkan, mengumumkan, dan menggandakan ciptaan orang lain kepada Polisi atau ke DJKI dan menuntut ganti rugi kepada pelaku. Bahwa pelaku dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata maupun penutupan akses terhadap akun yang dipakainya untuk melakukan pelanggaran hak cipta sesuai ketentuan yang berlaku dan adanya aduan dari pemegang hak cipta atau pemilik lisensinya.

Menurut peneliti, dengan adanya aturan yang jelas dan sanksi yang tegas seharusnya dapat membuat para pelaku yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera dan meminimalisir adanya pelanggaran lagi, dan hal tersebut harus dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hukum dan menghargai karya cipta orang lain. Perlu diketahui bahwa setiap karya yang telah diciptakan memiliki hak cipta apabila sudah didaftarkan ke pihak yang berwajib. Adanya hak cipta, tentu akan melindungi dari segala hal jika sewaktu-waktu karyanya di bajak. Memiliki perlindungan hak cipta akan membantu proses hukum berjalan secara adil dan sesuai aturan yang berlaku. Akan lebih baik jika menonton film melalui bioskop atau platform resmi.

Efektivitas Penerapan Hukum Hak Cipta Terhadap Pelaku Spoiler Film di Tiktok

Norma-norma hukum itu mengikat. Orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka

harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹³

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.¹⁴

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidak berhasilnya suatu hukum bergantung pada:¹⁵ *Pertama*, substansi hukum (*legal substance*) yang merupakan sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Sebagai negara yang menganut *civil law system*, hukum merupakan peraturan yang tertulis, sedangkan aturan

¹³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h. 40.

¹⁵ Lawrence M.Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h. 32.

yang tidak tertulis tidak bisa dinyatakan sebagai hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya". Dalam hal ini bisa atau tidaknya suatu pelanggaran dikenakan sanksi, jika perbuatan tersebut sanksinya terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, struktur hukum (*legal structure*). Sistem struktural menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Sebagus apapun produk hukum jika aparat penegak hukum tidak memaksimalkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas, maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Maka dari itu, keberhasilan suatu penegakan hukum yaitu berasal dari personality penegak hukum.

Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) sebagai sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu di dalamnya. Budaya hukum menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Jika sebaliknya masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait.

Dalam suatu peraturan sudah dijelaskan perintah, larangan dan sanksi hukum. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari aspek, substansi hukum, masih lemahnya Undang-Undang Hak Cipta dalam menyoroti dan menyikapi aplikasi yang melanggar hak cipta. Hal ini dibuktikan dengan TikTok yang tidak mengatur karya sinematografi di dalam kebijakannya dan belum adanya aturan khusus yang mengatur terkait tindakan spoiler film. Harus adanya

pembaharuan produk hukum untuk melengkapi peraturan yang masih kurang.

Dari aspek struktur hukum, dalam pelaksanaan peraturan ini, yaitu polisi, DJKI, Kominfo sudah melakukan himbauan maupun sosialisasi terkait tindakan spoiler film di media sosial, namun dalam kenyataannya masih banyak akun-akun yang melakukan spoiler atau pembajakan di media sosial. Kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam menyikapi permasalahan-permasalahan pelanggaran hak cipta sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada masyarakat sehingga mereka dapat melakukannya berulang kembali. Hal ini dapat ditimbulkan oleh rasa kurang percayanya masyarakat (termasuk pencipta) kepada aparat penegak hukum yang berdampak memberikan rasa enggan kepada masyarakat untuk menyerahkan dan melaporkan persoalan dan perlindungan terkait kepentingan mereka kepada proses dan institusi hukum (pengadilan).¹⁶ Begitu juga dengan pelaku pelanggaran lebih banyak dari penegak hukum, menurut pandangan (DJKI) atas problematika yang terjadi tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka (masyarakat) perlunya akses kemudahan dan tidak perlu untuk mengeluarkan biaya yang mahal demi terpenuhinya kebutuhan atas hiburan, maka terciptalah pelanggaran yang sangat banyak. Terlebih akses teknologi internet di Indonesia terbilang sangat mudah untuk menggunakannya dengan demikian menjadi problem dalam penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Adanya keterbatasan sumber daya manusia dan juga sistem yang baik untuk mengontrol aktivitas online di media sosial. Keterbatasan akan adanya sumber daya manusia dan juga sistem yang baik, menjadi bagian evaluasi terhadap

¹⁶ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14 No.2 (2014), h. 217

pemerintah. Dengan memahami apa yang sudah menjadi masalah seharusnya pemerintah berperan aktif untuk dapat memenuhi atas kekurangan/keterbatasan yang ada. Dimana para pelaku dengan mudahnya membajak dan menyebarkan film ke media sosial dan proses hukumnya cukup sulit untuk pelaku karena di media internet banyak hal yang cukup rumit untuk melacak pelaku dan mencari bukti untuk diselidiki. Ada beberapa kemungkinan yang seharusnya dapat dilakukan misalnya menciptakan lembaga khusus untuk mengontrol segala bentuk aktivitas pada jaringan internet, khusus pada hak cipta dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dapat diamini dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang berbudaya komunal/sosial tradisional ke masyarakat yang berbudaya individual modern hal demikian yang membuat problematik permasalahan penerapan hukum tidak begitu baik dalam menerapkannya.¹⁷

Dari aspek budaya hukum, masyarakat harus ikut serta mematuhi produk hukum yang telah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi penghargaan kepada para pencipta. Peraturan undang-undang yang telah diperbarui dari delik umum ke delik aduan sangat mempengaruhi perlindungan karya cipta sinematografi di media sosial. Karena kita sebagai penegak hukum akan bertindak jika adanya laporan ketika terdapat pelanggaran hukum. Dengan kata lain, pemegang hak cipta merasa sudah dilindungi oleh pemerintah, atas segala haknya. Banyak masyarakat yang belum paham hukum hak cipta di mana mereka menganggap menonton spoiler film di media

¹⁷ Khairul Hidayah, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Pers 2017), h. 44.

termasuk hal yang lumrah. Masyarakat kita masih senang dan menikmati film-film yang dibajak. Dalam hal ini, para pelaku pembajakan film tidak mendapatkan sanksi/tindakan yang serius dari aparat penegak hukum. Hal ini memberikan pemikiran kepada mereka bahwa hal ini merupakan pelanggaran yang biasa dan tidak menjadi sebuah masalah. Dalam segi ekonomi, yang di mana dengan menonton film bajakan akan menekan biaya lebih hemat untuk menonton film.

Hal seperti ini timbul dari ketidakmerataan kebutuhan hidup masyarakat yang masih sulit sehingga keadaan ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan kejahatan, seperti pelanggaran tindak pidana hak cipta/pembajakan film. Mereka berpikir bahwa hal ini merupakan solusi untuk dapat menikmati film yang sedang tayang tanpa mengeluarkan biaya lebih.¹⁸ Seharusnya mereka menonton di bioskop dan platform resmi sebagai bentuk menghargai karya cipta orang lain. Namun, pencipta dan pemegang hak cipta film juga seringkali tidak merespon atas karya nya yang dibajak beredar di internet, padahal mereka bisa saja mendapatkan pelaku dan buktinya pada bioskop untuk mencegah mereka menyebarkannya ke media sosial. Namun, ada saja pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan metode marketing agar membiarkan karya filmnya dapat populer di media sosial sehingga menarik minat masyarakat untuk menontonnya. Tidak heran bahwa kasus spoiler film atau pembajakan ini masih sedikit yang diajukan ke Pengadilan.

Menurut (DJKI) Penerapan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, cukup baik untuk melindungi segala bentuk karya cipta atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dibandingkan dengan undang-

¹⁸ Kadek Januarsa, Adi Sudharma, dkk, *Law Enforcement of Pirated Film User Sites Due to the Implementation OF Physical Distancinf in Despansar* Vol. 44 No.1 (2022), h. 31.

undang sebelumnya. Dalam Undang-undang yang baru saat ini banyak hal-hal yang sudah diperbaharui baik itu dengan sistem perlindungannya dan juga penegakan hukumnya. Maka, sudah cukup untuk mempertahankan haknya dari para pelaku pelanggaran dan membantu pencipta untuk melindungi karyanya apabila terjadi pelanggaran seperti pembajakan atau spoiler film. Perlindungan atas karya-karya Hak Cipta sudah sangat cukup terlindungi. Melalui pembaharuan undang-undang saat ini pemerintah memberikan ruang untuk pencipta/pemegang hak cipta untuk dapat langsung mengadakan atas kerugian yang dialaminya melalui laporan terhadap kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yaitu DJKI di bawah Kementerian Hukum dan HAM dengan delik aduan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam regulasi Islam di Indonesia menetapkan bahwa kebebasan inovasi berlisensi merupakan bagian dari *huquq al-maliyah* (hak kekayaan) yang memperoleh jaminan hukum sebagai *al-maal* (harta kekayaan). Dalam perspektif ulama, hak cipta memiliki kedudukan yang berharga karena merupakan bentuk kepemilikan intelektual yang harus dilindungi sebagai hasil dari kreativitas dan kerja keras penciptanya. Hak cipta juga dikategorikan sebagai bagian dari *huquq maliyyah*, yaitu hak kekayaan yang memiliki perlindungan hukum sebagaimana harta kekayaan lainnya. Perlindungan ini diberikan karena hak cipta merupakan hasil pemikiran manusia yang telah melalui proses kreatif sehingga memiliki manfaat intelektual dan nilai ekonomi yang bersifat eksklusif bagi pemiliknya. Selain itu, dalam hukum Islam, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*) dalam transaksi bisnis. Hak ini dapat menjadi bagian dari akad *tabarru'at* (non-komersial) maupun akad *mu'awadhah* (pertukaran secara komersial). Dengan demikian, hak cipta memiliki nilai ekonomi yang memungkinkan untuk diwariskan, dihibahkan, atau bahkan diwakafkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa hak cipta

bukan hanya memiliki nilai moral, tetapi juga aspek ekonomi yang harus dijaga dan dihormati dalam konteks hukum Islam.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta serta Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yang menegaskan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam. Dalam hukum Islam, hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*ma'shum*), sebagaimana perlindungan terhadap *mal* (harta kekayaan) lainnya. Namun, perlindungan tersebut hanya diberikan terhadap HAKI yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik dalam bentuk akad *mu'awadhah* (pertukaran atau transaksi komersial) maupun akad *tabarru'at* (non-komersial), serta dapat diwariskan atau diwakafkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian, penjualan, impor, ekspor, distribusi, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan, dan pembajakan karya orang lain tanpa izin, merupakan tindakan yang zalim dan dalam hukum Islam dinyatakan sebagai perbuatan yang haram. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan atas hasil karya intelektual, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak tersebut guna menjaga keadilan dan mencegah eksploitasi yang merugikan pencipta maupun pemilik sah karya intelektual.¹⁹

Efektivitas undang-undang akan sangat baik jika memang benar diterapkan dengan baik. Akan tetapi, justru dengan adanya delik aduan terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi terhadap hak cipta, hal tersebut

¹⁹ Lihat <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/30.-Hak-Cipta.pdf> diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

sangat tidak efektif. Undang-undang yang baru ini sifatnya aduan, jika tidak ada aduan maka tidak berjalan dengan semestinya. Jika pencipta atau pemegang hak cipta hanya diam saja tidak ada laporan sama sekali terkait pelanggaran yang terjadi, maka kerugian bagi kami pencipta/pemegang hak cipta akan terus-menerus dirugikan dan pelaku akan leluasa dalam melakukan pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan.

Spoiler film di TikTok dimulai dengan adanya aktivitas pembajakan film di bioskop lalu disebar di media sosial. Setelah masyarakat mendapatkan karya tersebut, mereka dapat dengan mudahnya memperbanyak dengan mendistribusikannya secara ilegal, dengan keuntungan yang sangat melimpah dan hal itu juga menjadi kerugian atas negara. Seharusnya pemerintah aktif untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Jika memang delik ini aduan itu sangat tidak efektif karena kami sebagai pelapor harus mengumpulkan segala bukti-bukti atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi.

Untuk mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta akibat penyebaran spoiler film di TikTok, diperlukan berbagai tindakan dan solusi yang komprehensif. Salah satu langkah utama adalah menutup seluruh situs web yang mengunggah atau menyebarkan karya sinematografi secara ilegal serta menutup akses unduhan yang disediakan oleh situs tersebut. Langkah ini sejalan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkumham dan Kominfo Nomor 14 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Selain itu, optimalisasi penerapan delik aduan perlu dilakukan guna memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang mengalami kerugian ekonomi akibat pelanggaran hak cipta.

Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi mengenai hukum hak cipta harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan

intelektual, terutama dalam konteks media sosial. Kampanye anti-pembajakan juga perlu dilakukan secara masif agar masyarakat memahami dampak negatif dari tindakan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pengawasan terhadap tindakan perekaman ilegal di tempat pertunjukan, seperti bioskop, perlu ditingkatkan guna mencegah penyebaran konten secara tidak sah di media sosial.

Lebih lanjut, penguatan regulasi yang berlaku menjadi aspek krusial dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat diwujudkan melalui kerja sama antara pemerintah, pencipta atau pemegang hak cipta, bioskop, penegak hukum, serta masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif. Khususnya dalam konteks media sosial seperti TikTok, diperlukan kebijakan yang lebih ketat agar platform tersebut dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran spoiler film yang berpotensi melanggar hak cipta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap karya sinematografi dapat semakin optimal serta memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta.

Melihat hal tersebut dapat dipahami bahwa berdasarkan Teori Hukum Lawrence Meir Friedman, ada 3 unsur yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 secara substansi hukum sudah cukup baik akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut masih belum sesuai dengan budaya dan perkembangan zaman yang ada. Oleh karena itu, membutuhkan rumusan yang lebih jelas lagi mengenai objek hak cipta dalam undang-undang hak cipta sehingga bisa melindungi para pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya-karyanya. Perlu adanya penyesuaian dan pengawasan hukum yang lebih baik antara kebijakan TikTok dan regulasi Undang-Undang Hak Cipta.

Kesimpulan

Penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki beberapa hambatan dalam penerapannya seperti pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan

yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta film yang ada di Indonesia serta pengetahuan masyarakat dan kesadaran hukum masih sangat kurang tentang hak cipta termasuk hukum yang mengaturnya. Pada kesadaran hukum, baik masyarakat maupun pencipta/pemegang hak cipta. Kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi penghargaan kepada para pencipta. Kondisi ini membuat para pencipta malas untuk berkarya. Para pemegang hak jarang dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi pada media sosial. Ketidakaktifan para pemegang hak dalam mempertahankan hak yang mereka miliki yang menyebabkan banyaknya pelanggaran atas hak ekonomi pemegang hak cipta dan hak terkait pada media sosial TikTok sekaligus menyebabkan sulitnya memberantas pelanggaran yang terjadi dikarenakan Undang-Undang Hak Cipta merupakan delik aduan.

Efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sudah cukup baik dalam beberapa sektor dalam melindungi hak-hak ekonomi bagi pencipta/pemegang hak cipta akan tetapi dalam melindungi karya cipta di media online seperti pada aplikasi TikTok pemerintah masih kurang ketika menangani dalam perlindungannya. Jika tidak ada pengaduan maka tidak ada penegakkan hukum yang berjalan dengan semestinya, seharusnya pemerintah berperan aktif dalam pemenuhan atas perlindungan. Kurangnya perlindungan hukum yang tegas dari TikTok terhadap karya berhak cipta sinematografi di Indonesia tergambar dari lemahnya Kebijakan Aplikasi TikTok yang tidak secara tegas menyebutkan “karya cipta sinematografi” dalam Ketentuan Layanan TikTok. Begitu pula dengan sistem TikTok yang tidak secara otomatis mendeteksi pelanggaran hak cipta film di dalam aplikasi. Untuk menghapus/mengurangi pengunduhan klip video di TikTok, pengguna dapat melakukannya dengan mengklik tombol "*report*". Namun hal ini sulit dilakukan karena masih banyak peminat pembajakan film di platform tersebut,

yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, aplikasi tersebut masih sulit diatasi akibat pembajakan dan spoiler film di TikTok.

Pustaka Acuan

- al, Nandiansyah et. 2022. "Kesadaran perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pengguna Karya Cipta Sinematografi Pada Media Internet." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol.1, No.2, h.22.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*. Bandung: Mandar Maju.
- Erizka, Permatasari. n.d. *Sebar Spoiler Cuplikan Film Di Tiktok, Langgar Hak Cipta?* Accessed Mei 11, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebar-ispoiler-i-cuplikan-film-di-tiktok--langgar-hak-cipta-lt614dc86b31980>.
- Ermansyah, Djaja. 2010. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Pustaka Timur.
- Friedman, Lawrence M. 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*. Bandung: Nusamedia.
- Ginting, Ras Elyta. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan. 2008. *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Naighbouring, rights dan Collecting Society*. Bandung: Alumni.

- Hidayah, Khairul. 2017. *Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Pers.
- Jened, Rahmi. 2013. *Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Justika, Redaksi. n.d. *Fakta Aturan Hukum Spoiler Film, Boleh Atau Dilarang?* Accessed September 14, 2022. <https://blog.justika.com/kekayaan-intelektual/aturan-hukum-spoiler-film/>.
- Kadek Januarsa, Adi Sudharma, dkk. 2022. "Law Enforcement of Pirated Film User Sites Due to the Implementation OF Physical Distancing in Denpasar ." Vol.44, No.1, h.31.
- Nisa, Wanda Ainun. 2023. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebaran Clip Film Indonesia Di Aplikasi TikTok Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*. Jakarta: Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, Sabian. 2009. *Dasar Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Putusan

Kepailitan Pengadilan Niaga." *Dinamika Hukum* Vol.14,
No.2, h.217.